



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk  
pengarahan bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke  
konperensi ke-V Kepala-kepala Negara/Pemerintah Non-Blok di  
Colombo, Srilangka pada tanggal 9 sampai tanggal 19 Agustus 1976;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Menteri Luar Negeri/Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia

Untuk :

PERTAMA :

Mempergunakan petunjuk-petunjuk pengarahan sebagaimana terlampir pada Instruksi  
Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang  
dibahas pada Konperensi ke V Kepala-kepala Negara/Pemerintah Non-Blok di Colombo,  
Srilangka pada tanggal 9 sampai tanggal 19 Agustus 1976;

KEDUA :

Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan konperensi selama  
berlangsungnya konperensi tersebut;

KETIGA :

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden

KEEMPAT :

Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Pemerintah Republik Indonesia  
menghadiri konperensi ke V Kepala-kepala Negara/Pemerintah Non-Blok di Colombo,  
Srilangka pada tanggal 9 sampai tanggal 19 Agustus 1976.;

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Agustus 1976  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SOEHARTO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN  
Instruksi Presiden RI  
Nomor 14 Tahun 1976.  
Tanggal 9 Agustus 1976.

PETUNJUK-PETUNJUK PENGARAHAN  
BAGI DELEGASI REPUBLIK INDONESIA  
KE KONPERENSI KE V KEPALA-KEPALA NEGARAPEMERINTAHAN  
NON-BLOK DI COLOMBO, SRILANGKA 9 SAMPAI 19 AGUSTUS 1976

I. UMUM

1. Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan untuk mengirim delegasi ke Konperensi Tingkat Tinggi Negara-Negara Non-Blok yang diadakan di Colombo, Srilangka dari tanggal 9 sampai 19 Agustus 1976 berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang diabdikan kepada kepentingan nasional, lagi pula mengingat kenyataan bahwa Indonesia adalah salah satu pendiri gerakan tersebut, maka Indonesia perlu ikut serta aktif memperjuangkan agar gerakan tersebut tetap setia pada prinsip-prinsip dan tujuannya yang semula.
  - b. Gerakan Non-Blok semulanya merupakan suatu forum politik bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan kepentingan mereka terhadap negara-negara besar. Dalam Perkembangan selanjutnya gerakan ini telah menjelma rnenjadi forum yang mencakup semua persoalan di mana soal-soal ekonomi menjadi makin lama makin menonjol. Karena itu sikap Indonesia harus mempertimbangkan sepenuhnya kepentingan Indonesia di bidang ekonomi.
  - c. dalam forum-forum Non-Blok sering diprakarsai pembicaraan masalah-masalah yang kemudian juga mengalami pembahasan di forum-forum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan forum-forum internasional lainnya. Karena itu perlu usaha pengamanan kepentingan Indonesia juga dilakukan pada pertemuan-pertemuan Non-Blok tersebut.
2. Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan Non-Blok memainkan peranan yang aktif untuk memperkuat kelompok moderat di KTT Colombo mengingat adanya gejala-gejala radikalisme.
3. Keikut sertaan Indonesia juga penting mengingat KTT Colombo berlangsung bertepatan dengan pengesahan integrasi Timor Timur dalam wilayah Indonesia sesuai dengan kehendak rakyat Timor Timur, dan mengingat kemungkinan perlunya pengamanan di forum tersebut.
4. Mengingat bahwa Presiden tidak dapat meninggalkan Tanah Air berhubungan peringatan hari ulang tahun Indonesia dan KTT Colombo bertepatan dengan peringatan tersebut, maka Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri selaku Wakil Pribadi Presiden



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## II. PEDOMAN/PENGARAHAN POKOK

### A. Politik

1. KTT Non-Blok berlangsung dalam suasana keredaan ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berlangsung bersamaan dengan makin intensifnya pertentangan antara Uni Soviet dan RRC.
2. Perlu diperhatikan adanya kecenderungan radikalisme yang disebabkan oleh terbatasnya keredaan sehingga negara-negara besar melanjutkan persaingan untuk memperluas daerah pengaruh mereka dikalangan negara-negara berkembang. Dalam keadaan demikian peranan gerakan Non-Blok tetap perlu ditingkatkan.
3. Kepentingan politik Indonesia yang utama yang dapat merupakan hambatan dalam peranan yang ingin dimainkan oleh Indonesia dewasa ini dalam menghadapi KTT Colombo adalah masalah Timor Timur. Mengingat kemungkinan bahwa Timor Timur, OPM dan barangkali juga RMS akan ditimbulkan dalam KTT Colombo, maka kepada Delegasi Republik Indonesia diberi wewenang sepenuhnya untuk mengambil sikap dan tindakan guna mencegah setiap usaha yang merupakan intervensi dalam negeri Indonesia. Harus ditegaskan dimuka forum tersebut bahwa masalah Timor Timur sekarang sudah merupakan masalah dalam negeri Indonesia dan bahwa setiap campur tangan dalam soal-soal dalam negeri akan ditentang keras oleh Indonesia
4. Indonesia menganjurkan supaya diterapkan secara konsekwen prinsip bahwa penyelesaian masalah-masalah regional sebaiknya diserahkan kepada region masing-masing karena mereka lah yang memaham permasalahanya secara lebih mendalam. Prinsip ini dipegang teguh oleh negara-negara Afrika, tapi sebaliknya negara-negara itu harus juga menghormati berlakunya prinsip tersebut bagi region-region lainnya. Delegasi diharapkan dapat menghindarkan dibicarakanya rmasalah-masalah yang kontrovesiil demi terpeliharanya persatuan dan solidaritas antar negara-negara Non-Blok.
5. Dalam rnenghadapi masalah Korea, Indonesia menunjukkan sikap yang mengandung pengertian bagi aspirasi-aspirasi baik dari Korea Utara maupun Selatan. Indonesia mendukung gagasan penyatuan kembali Korea secara damai dan mengharapkan dimulainya kembali dialog antara Utara dan Selatan untuk menghilangkan perasaan permusuhan dan curiga mencurigai antara kedua belah pihak dan sebaliknya menimbulkan perasaan saling mempercayai, kerukunan dan perdamaian di Korea.
6. Perkembangan di Timur Tengah merupakan masalah yang sangat pelik. Berhubung dengan itu Indonesia menekankan pulihnya persatuan dan kerukunan antar Arab dan mendukung sepenuhnya posisi yang mencerminkan kesatuan kehendak dari semua negara-negara Arab.
7. Dalam masalah dekolonisasi Indonesia mendukung prinsip bahwa nasib serta hari kemudian rakyat di wilayah-wilayah jajahan terletak pada kehendak rakyat itu masing-masin. Seperti yang ini dikemukakan di PBB, Indonesia membantu negara-negara lain dalam usaha mencari penyelesaian atas masalah-masalah Rhodesia Selatan, Namibia dan masalah politik "apartheid" Afrika Selatan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

## B. Ekonomi

1. Perlu diusahakan agar forum Non-Blok lebih memperhatikan kepada masalah ekonomi dan lebih dimanfaatkan sebagai wahana memupuk kesetiakawanan di antara anggotanya untuk bersama-sama dengan negara-negara berkembang lainnya memperjuangkan kepentingan bersama di forum-forum internasional.
2. Kelompok Non-Blok merupakan penggerak dari Kelompok 77 yang keanggotanya meliputi semua negara-negara berkembang. Gagasan Tim Ekonomi Dunia Baru yang diprakarsai oleh negara-negara Non-Blok telah berhasil diterima oleh Majelis Umum PBB berkat kekompakan persatuan negara-negara berkembang yang tergabung dalam Kelompok 77. Kedua kelompok ini selalu harus saling tunjang menunjang serta isi mengisi, dalam perjuangannya untuk mencapai tujuan-tujuan dalam kerangka pelaksanaan terbentuk Tata Ekonomi Dunia Baru.
3. Realisasi Tata Ekonomi Dunia Baru yang sangat diidam-idamkan bersama oleh negara-negara berkembang pertama-tama tergantung pada kerjasama antara negara-negara berkembang itu sendiri. Untuk itu konsep swa-sembada perlu disempurnakan dan ditingkatkan baik secara individu maupun secara kolektif antara negara-negara berkembang seperti yang telah kita laksanakan dalam rangka ASEAN. Dalam menghadapi negara-negara maju hendaknya sejauh mungkin dielakkan konfrontasi melainkan ditempuh cara dialog dalam semangat kerjasama.
4. Indonesia perlu memainkan peranan yang lebih besar di waktu-waktu mendatang dalam forum-forum Non-Blok dan forum-forum lainnya, antara lain, Konperensi Islam, OPEC, Konperensi Paris, yang kesemuanya harus diarahkan untuk mensukseskan perjuangan kepentingan yang lebih luas dalam rangka Kelompok-77.
5. Dalam Hubungan ini perlu diusahakan agar KTT ke-5 Non-Blok ini dapat memberikan tekanan politis yang lebih besar lagi untuk melancarkan perundingan-perundingan lebih lanjut dalam rangka keputusan UNCTAD IV mengenai Program Komoditi Terpadu dengan Dana Bersama dan Cadangan Penyangga sebagai unsur utamanya.  
Perlu dilakukan pengugahan komitmen terhadap Dana Bersama baik oleh negara-negara berkembang sendiri maupun oleh negara-negara maju sehingga sasaran modal operasi dana tersebut dapat dicapai dan tidak terjadi kesimpang siuran.
6. Keputusan-keputusan Konperensi Dakar yang telah diterima baik oleh Konperensi Menteri Luar Negeri Negara-negara Non-Blok di Lima mengenai Dana dan Cadangan Penyangga hendaknya pula dilihat dan diperlukan sebagai usaha-usaha untuk mendorong kelancaran perundinga-perundingan dalam rangka UNCTAD tersebut. Dengan demikian Dana dan Cadangan Penyangga dalam rangka Non-Blok bukanlah merupakan tandingan melainkan sebagai tenaga pendorong menuju terbentuknya Dana Bersama dan Cadangan Penyangga UNCTAD.
7. Mengingat dalam sidang ke- IV UNCTAD tidak tercapai kesepakatan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju mengenai masalah hutang, KTT ini perlu mencurahkan perhatian yang lebih besar untuk merumuskan strategi bersama agar dalam perjuangan di forum-forum internasional yang bersangkutan perumusan penyelesaian masalah hutang dimaksud dalam Dokumen Manila dapat diterima.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

8. Perjuangan negara-negara berkembang untuk memperoleh sepenuhnya atas sumber-sumber alamnya yang dewasa ini sedang bergejolak perlu mendapat perhatian khusus pula. Sehubungan dengan itu KTT ini juga perlu menggaris bawahi lagi asas-asas kedaulatan penuh negara-negara berkembang atas sumber-sumber alamnya yang sampai sekarang ini belum diakui oleh negara-negara maju khususnya yang mempunyai banyak perusahaan-perusahaan raksasa transnasional.

## II. HAL-HAL LAIN

1. Terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul dan dihadapi delegasi selama sidang berlangsung, keputusan diserahkan kepada Ketua Delegasi.
2. Dalam waktu sebulan tiba dari Colombo, Delegasi supaya memberi laporan lengkap tentang hasil-hasil Konferensi tersebut kepada Presiden.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 9 Agustus 1976.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
S O E H A R T O